

BUDAYA ORGANISASI DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Supriatmo Lumuan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tompotika

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah budaya organisasi mampu menjadi pencegah perilaku korupsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, 2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberantasan perilaku korupsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah populasi 101 dengan menggunakan informan 8 ditambah 1 dari Kejaksaan Negeri Banggai sehingga berjumlah 9 secara *purposive sampling*, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen: observasi, wawancara, dan melalui dokumen, data tersebut kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya yang positif mampu menjadi pencegah bagi perilaku korupsi para pegawai, faktor penghambat pemberantasan perilaku korupsi, meliputi kepemimpinan, sistem, aturan, individu, serta disiplin.

Kata Kunci: *budaya organisasi, korupsi*

PENDAHULUAN

Salah satu dari penyebab kemerosotan bangsa ini disebabkan karena maraknya korupsi yang telah merusak nilai-nilai kebersamaan dan rasa memiliki bangsa ini. Perilaku korupsi memang sudah menggejala di mana-mana. Entah, antara pengusaha dan pejabat birokrasi yang mempunyai kekuasaan, atau antara warga masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah.

Berbagai kalangan berpendapat bahwa perilaku korupsi di Indonesia sudah melembaga dan sistematis di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat melihat dan merasakan praktik-praktik tindakan korupsi yang semakin marak dan meluas. Korupsi

yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas, sehingga korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Bahkan PERC (*Political & Economic Risk Consultancy*) merilis negara-negara terkorup Asia-Pasifik, yang memilikinya adalah Indonesia keluar sebagai pemenangnya. Berikut nama-nama negara tersebut.

Daftar Negara Terkorup di Asia Pasifik (PERC2010) www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id...1. Diakses pada tanggal 29 oktober 2011), sebagai berikut.

NO	NEGARA	IPK
1	Indonesia	9,27
2	Kamboja	9,10
3	Vietnam	8,07
4	Filipina	8,06
5	Thailand	7,60
6	India	7,18
7	China	6,52
8	Malaysia	6,47
9	Taiwan	6,28
10	Korea Selatan	5,98
11	. Makau	4,96
12	Jepang	3,49
13	Amerika Serikat	3,42
14	Hongkong	2,67
15	Australia	2,28
16	Singapura	1,42

Data di atas menunjukkan bangsa ini harus segera bangkit dan menyusun strategi memerangi korupsi yang sudah sedemikian parahnyanya, sampai bangsa ini mendapat peringkat No 1 dalam hal merampok uang rakyat (korupsi). Ironinya sebagian besar perilaku korupsi itu berada di tubuh birokrasi yang merupakan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas negara.

Perilaku korupsi di jajaran birokrasi pemerintahan saat ini tergolong sangat parah. Jika diibaratkan penyakit dalam

tubuh manusia, tak ubahnya seperti penyakit kanker ganas yang akar-akarnya sudah menjalar ke seluruh bagian tubuh. Meski belum sampai kepada ajal, penderitaan akibat dari penyakit ini sungguh amat menyakitkan. Saat ini masyarakat dapat menyaksikan berbagai peristiwa yang memilukan, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari korupsi.

Otonomi daerah yang menjadi ekspresi dari penerapan demokrasi di daerah ternyata menuai banyak masalah pada tubuh birokrasi. Banyak para bupati, gubernur, serta para pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi ini menandakan bahwa penerapan desentralisasi bukan hanya melaksanakan desentralisasi kewenangan tetapi telah terjadi desentralisasi penyebaran virus perilaku korupsi dari pusat ke daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu diperlukan kesesuaian dengan kondisi di lapangan agar metode penelitian yang digunakan tepat di dalam memperoleh pemahaman berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam memecahkan permasalahan penelitian.

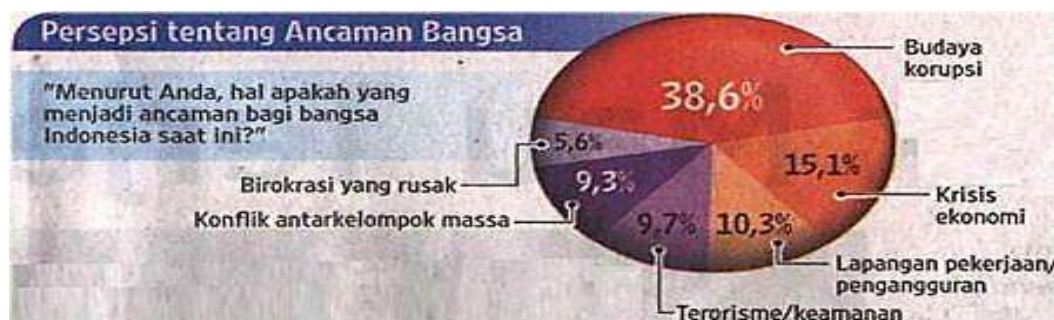
Bogdan dan Taylor (1975:5) (dalam Basrowi dan Suwandi 2008: 21), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

TEORI Budaya dan Pencegahan Perilaku Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Bahkan

pemberantasan korupsi juga merupakan agenda di tingkat regional dan internasional. Ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga internasional yang turut menegaskan komitmennya untuk bersama-sama memerangi korupsi. Salah satu penghambat kesejahteraan negara berkembang pun disinyalir akibat dari praktik korupsi yang eksekutif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, maupun yang melibatkan masyarakat yang lebih luas.

Bahkan salah satu yang membuat bangsa ini terus terperosok pada jurang kemelaratan adalah perilaku korupsi. Ini kemudian dapat terlihat dari tabel persepsi atau tanggapan masyarakat tentang ancaman bangsa <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global>), sebagai berikut.



Hasil di atas memperlihatkan betapa perilaku korupsi telah menjadi ancaman bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh keinginan para elit untuk kemudian

mereduksi atau bahkan menghilangkan korupsi dari negara ini, selama keinginan itu tidak dimulai dari para elit bangsa ini apakah elit dari para penegak hukum, elit pemerintahan dan elit politik, maka upaya

memerangi korupsi hanya akan menjadi wacana belaka tanpa bukti nyata.

Indikasi tetap maraknya praktik korupsi di negara ini dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi. Beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga independen internasional lainnya juga membuktikan fakta yang sama, walaupun dengan bahasa, instrumen atau pendekatan yang berbeda. Situasi ini jelas memprihatinkan banyak pihak. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum.

Budaya positif menjadi sangat dibutuhkan dalam mengurangi perilaku dan praktik-praktik korupsi, karena kalau budaya dalam konstruksi nilai dan norma yang diyakini dalam hal yang negatif seperti kebiasaan memberikan uang pelicin tadi, maka budaya dalam konteks ini hanya akan menyuburkan praktik dan perilaku korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa budaya sangat penting dalam pencegahan perilaku korupsi, di mana budaya dalam konteks pencegahan korupsi ini harus dikonstruksikan oleh beberapa unsur agar bisa menjadi pencegah perilaku korupsi antara lain faktor manajemen. Ini sangat penting dalam menciptakan sebuah situasi

yang kondusif bagi seluruh pegawai dalam birokrasi, selama prinsip-prinsip manajemen dilaksanakan dengan baik, maka akan melahirkan budaya positif yang menjadi pendorong bagi terciptanya birokrasi yang berkualitas.

Kedua faktor aturan dalam konstruksi budaya bisa mendorong agar budaya bisa menjadi pencegah terjadinya korupsi. Aturan berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan kepada setiap pegawai ini memungkinkan melahirkan budaya positif untuk menjadi pencegah terjadinya korupsi. Ketika faktor personal dalam konstruksi budaya juga sangat penting, karena ketika setiap individu mempunyai kesadaran dan komitmen serta niat yang kuat, yang hadir dari lubuk yang paling dalam untuk melakukan hal-hal yang positif, ini bisa menjadi energi positif untuk meretas budaya positif dalam rangka pencegahan perilaku korupsi.

Budaya dan Konstruksi Organisasi Birokrasi

Seiring bergulirnya Era Reformasi pada tahun 1998 yang meliputi berbagai aspek kehidupan, reformasi birokrasi Indonesia juga menjadi sebuah harapan. Adapun salah satu aspek yang penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi tersebut adalah reformasi pada tataran budaya organisasi publiknya. Karena reformasi birokrasi tidak akan pernah tercapai jika

budaya birokrasinya masih bobrok. Sebagaimana diketahui bahwa hampir selama 32 tahun di bawah pemerintahan rezim orde baru, budaya birokrasi Indonesia terbilang kotor dengan maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Budaya merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam mengarahkan dan membentuk perilaku para anggota organisasi birokrasi dalam menjalankan roda organisasi. Salah satu kelemahan dalam membangun birokrasi yang berkualitas saat ini salah satunya adalah kurang terbangunnya budaya positif dalam organisasi birokrasi seperti budaya kerja keras, budaya disiplin, budaya malu kalau mencuri uang rakyat (korupsi), dan lain sebagainya. Ini penting untuk membangun birokrasi yang berkualitas.

Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (birokrasi) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial, dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Otonomi daerah yang merupakan salah satu solusi untuk menciptakan

pemerintahan yang efektif ternyata menuai banyak masalah dalam implementasinya di daerah. Birokrasi di daerah banyak menyisakan masalah dalam pengelolaannya, mulai dari terciptanya raja-raja kecil dalam birokrasi dan masalah korupsi di tubuh birokrasi.

Korupsi kian mencemaskan setelah implementasi otonomi daerah. Arah desentralisasi yang membawa semangat keadilan distributif, sumber-sumber negara yang selama 32 tahun dikuasai secara otoriter oleh pemerintah pusat, kini justru menjadi ajang distribusi korupsi di mana aktor dan areal korupsi kian meluas. Praktik korupsi tidak lagi terorganisir dan terpusat, tetapi sudah terfragmentasi seiring dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan baru (<http://antikorupsi.org/antikorupsi/?q=tentang.icw>. Diakses pada tanggal 1 maret 2012).

Budaya disiplin memang menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi birokrasi di daerah, faktor kepemimpinan daerah bisa menjadi solusi untuk mematahkan kebiasaan-kebiasaan buruk tentang kedisiplinan. Seorang pemimpin di daerah mampu menciptakan budaya disiplin bagi para pegawai di daerah dengan kewenangan yang dimilikinya. Seorang pemimpin juga mampu menciptakan budaya baru bagi birokrasi yang dipimpinnya dalam membangun birokrasi yang lebih baik. Komitmen dari seorang pemimpin menjadi

sangat penting dalam menciptakan sebuah kebiasaan baru bagi seluruh pegawai, berupa aturan yang mengikat dan memiliki konsekuensi apabila dilanggar.

Praktik dan Perilaku Korupsi

Korupsi tidak akan pernah mati. Ia akan tetap abadi dan akan terus menggejala seiring dengan denyut nadi manusia. Secara historis, korupsi dikenal oleh manusia semenjak ia mengenal relasi sosial yang berbasis uang dan alat tukar barang, dari situlah korupsi mulai ditemukan. Perbedaannya dengan korupsi zaman sekarang mungkin hanya kadar dan modusnya.

Kasus korupsi yang menjadi sorotan adalah korupsi yang terjadi di tubuh birokrasi. Korupsi di tubuh birokrasi mempunyai dampak yang luas dan destruktif terhadap pembangunan ekonomi serta masyarakat secara umum. Korupsi dalam birokrasi pada umumnya berskala

luas dengan jumlah (nominal) yang besar dan melibatkan pejabat negara, elit politik, maupun pegawai negeri.

Fenomena menarik dan sangat menyedihkan dengan berjalannya era pembangunan daerah mestinya setiap daerah otonom semakin mandiri dalam pembangunan dan semakin sejahtera dalam melaksanakan konstitusi negara. Namun sayangnya tugas mulia desentralisasi berbuah simala kama yaitu lahirnya generasi korup baru yang dahulunya tidak tersentuh oleh hukum, kini justru semakin terbuka akses publik terhadap pelanggaran dan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah (<http://mjulijanto.wordpress.com/tag/tindak-pidana-korupsi/>).

Bahkan Elok Dyah Meswati dan Brigitta Iswara Laksmi (2011:73), memaparkan Rekap Tren Korupsi di daerah berdasarkan pelakunya 2008-2011, yaitu:

Pelaku korupsi	Jumlah Kasus
Kepala/mantan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota,dan atau sebaliknya	29
Pimpinan/mantan pimpinan DPRD	16
Anggota/mantan anggota DPRD	37
Pejabat/mantan pejabat instansi pemda (kepala dinas)	64
Pejabat BUMN/BUMD (direktur)	4
Pejabat KPUD	3
Pimpinan pengadilan	1
Pimpinan Universitas	1
Aktivis LSM	9
Pejabat kecamatan/kelurahan	4
Lainnya	5

Sumber: Litbang kompas/stn, diolah dari pemberitaan kompas dan KPK

Bagan di atas menunjukkan bahwa otonomi daerah telah menjerat banyak daerah pada masalah korupsi. Konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, pada kenyataannya bukan hanya kewenangan yang terdesentralisasi dari pusat ke daerah tetapi perilaku korupsi juga ikut terdesentralisasi. Bagan di atas juga menunjukkan kepala daerah dan kepala SKPD (kepala dinas) banyak mendominasi perilaku korupsi.

Dari semua pembahasan dan penjelasan menunjukkan bahwa telah terjadi praktik-praktik perilaku korupsi para pegawai, hanya saja bentuk-bentuknya yang berbeda-beda. Praktik-praktik korupsi yang banyak terjadi adalah korupsi waktu di mana telah ditetapkan waktu datang kantor dan waktu pulang tetapi masih banyak pegawai yang melanggar ketentuan itu. Hal itu tergolong korupsi waktu. Korupsi yang menyangkut kerugian negara atau korupsi keuangan yang terjadi di sekretariat daerah adalah kasus yang sekarang mencuat yaitu kasus pegawai fiktif yang telah merugikan negara sekitar 680 juta.

Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi

Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu dan menghambat pembangunan nasional karena

karupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang sangat besar di masa terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini memengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Strategi pemberantasan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Selama ini praktik korupsi dianggap sesuatu yang wajar terjadi. Padahal perilaku korupsi harus dicitrakan dan diperlakukan sebagai perilaku kriminal, sama halnya dengan tindak kriminal lainnya yang memerlukan penanganan secara hukum.

Karena itulah tindak pidana korupsi ini perlu segera diberantas. Upaya pemberantasan korupsi secara optimal haruslah dimulai dari pemimpin negeri ini. Sekadar komitmen saja untuk memberantas tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan tegas di dalam menegakkan komitmen tersebut. Tidak cukup hanya dengan berpidato atau mengeluarkan pernyataan saja untuk menegaskan komitmen tersebut, sementara minim tindakan tegas di lapangan.

Pendekatan *stick and carrot* atau yang lebih kita kenal sebagai *reward and Punishment* yaitu memberikan penghargaan tetapi sekaligus memberikan sanksi kepada setiap para pegawai. Hal ini sedikit memengaruhi perilaku korupsi para pegawai. Berkaitan dengan pendekatan *stick and carrot*, Kwik Kian Gie (2003: 2) (dalam Susanto Zuhdi, 2009:54) yang menyatakan bahwa keberhasilan Singapura dalam pemberantasan korupsi karena menerapkan system “*Stick and Carrot*”. Dalam sistem ini para pegawai sipil dan militer harus digaji melebihi cukup, sesuai *merit system* sehingga mereka memiliki kebanggaan. Akan tetapi harus ditindak dan dihukum secara harfiah dipukul dengan *stick* manakala melanggar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan penjelasan di atas, bahwa faktor penghambat pemberantasan korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi penting dikarenakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk mengubah perilaku-perilaku korupsi pada suatu daerah atau instansi yang dipimpinnya. Pemimpin dapat melakukan dengan menjadi contoh atau teladan bagi para pegawainya tentang bagaimana memerangi korupsi atau

menggunakan kekuasaannya untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, faktor kepemimpinan menjadi penghambat utama bagi pemberantasan korupsi ketika seorang pemimpin tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memerangi korupsi.

2. Faktor Sistem

Sistem mempunyai andil yang besar dalam mengurangi korupsi karena sistem menyangkut terciptanya kesempatan bagi para pegawai untuk melakukan praktik-praktik korupsi. Sistem yang baik akan menutup celah bagi terciptanya korupsi. Bagaimana sistem pengawasan yang ketat dan terukur akan menutup rapat kesempatan terjadinya praktik-praktik korupsi. Sehingga faktor sistem menjadi salah satu yang bisa menjadi penghambat bagi pemberantasan korupsi karena banyaknya kesempatan untuk melakukan korupsi.

3. Faktor Aturan

Aturan menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat sanksi bagi siapapun yang melakukan korupsi, ini mengakibatkan efek jera bagi para pegawai/aparatur pemerintahan untuk melakukan praktik-praktik korupsi. Para pelaksana dari proses hukum sangat penting karena mereka-mereka yang menjadi pelaksana dari penegakan

hukum tentang korupsi. Jangan sampai seperti yang sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu terjadi redefenisi perangkat penegak hukum, seperti KUHP diartikan Kasih Uang Habis Perkara, HAKIM diartikan Hubungi Aku Kalau Ingin Menang, dan JAKSA diartikan Jangan Khawatir Saya Atur. Ini menjadi tantangan dari para penegak hukum untuk menegaskan kembali komitmen mereka tentang pemberantasan korupsi. Aturan bisa menjadi penghambat bagi pemberantasan korupsi kalau aturan (hukum) tidak memberikan hukuman yang keras bagi para pelaku korupsi.

4. **Faktor Individu**

Faktor individu menjadi sangat sentral dalam upaya pemberantasan korupsi, karena bagaimanapun seorang pemimpin memerangi korupsi, bagaiman sistem dibuat untuk mengurangi korupsi dan sekeras apapun aturan dibuat untuk menjerat para pelaku korupsi, tetapi kalau setiap individu memang mempunyai niat untuk korupsi maka akan susah untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, pembinaan setiap aparatur pemerintahan tentang bagaimana seharusnya memaknai status mereka bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dimaknai sebagai

pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan aparatur yang berkualitas dan bertanggung jawab. Faktor individu menjadi penghambat utama bagi pemberantasan korupsi, karena faktor inilah menjadi aktor bagi terciptanya perilaku korupsi.

5. **Faktor disiplin**

Faktor disiplin menjadi sangat penting dalam pemberantasan korupsi, karena menyangkut ketaatan pada hal-hal positif yang telah menjadi kesepakatan. Oleh karena disiplin bisa menjadi penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi ketika disiplin itu tidak ditegakkan. Dapat dibayangkan ketika birokrasi di daerah tidak menegakkan disiplin bagi para pegawai, maka akan tercipta sebuah suasana yang tidak kondusif, ini kemudian melahirkan dan menumbuhkan praktik-praktik korupsi. Disiplin menyangkut ketertiban dan keseimbangan birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, disiplin menjadi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari perilaku korupsi.

6. **Faktor Pemenuhan Kebutuhan**

Kurangnya pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu dari faktor

penghambat dari pemberantasan korupsi, sehingga remunerasi (peningkatan gaji) menjadi penting untuk kemudian mereduksi perilaku korupsi dari para pegawai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka ditarik beberapa kesimpulan bahwa 1) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi mampu menjadi pencegah perilaku korupsi pada sekretariat daerah kabupaten Banggai Kepulauan; dan 2) hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu: faktor kepemimpinan, system, aturan, individu, disiplin, dan faktor pemenuhan kebutuhan.

Saran meliputi: 1) Harus ada spirit dan semangat yang terintegrasi dari aparatur birokrasi dengan pemimpin di daerah, serta membuat sistem yang komprehensif, aturan yang tegas, sehingga meretas budaya yang positif bagi semua aparatur birokrasi. Dengan demikian budaya mampu menjadi pencegah bagi terciptanya korupsi. Serta harus ada keinginan yang kuat dari semua aparatur birokrasi untuk melawan korupsi, atau bahkan harus ada slogan yang dibuat untuk menggugah kesadaran yang kuat tentang semangat melawan korupsi; serta 2) memaksimalkan semua hambatan sebagai

kekuatan untuk menjadi pendukung dalam upaya pemberantasan korupsi seperti:

a. faktor kepemimpinan

Kepemimpinan pada sekretariat daerah harus berada di garis terdepan dalam pemberantasan korupsi dan menjadi teladan bagi semua pegawai, agar sikap itu menjadi energi positif dan kesadaran bagi semua pegawai akan pemberantasan korupsi di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. faktor sistem

Harus ada perbaikan sistem yang komprehensif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan agar tercipta sebuah sistem yang terintegrasi, di mana sistem kerja dan sistem pengawasan harus terintegrasi agar menciptakan sebuah kualitas kinerja yang berimplikasi pada birokrasi yang bersih dari korupsi.

c. faktor aturan

Aturan sangat penting untuk menciptakan ketertiban dalam pengelolaan birokrasi, oleh karena itu harus ada upaya membuat peraturan yang mereduksi atau membuat efek jera bagi terciptanya praktik-praktik perilaku korupsi di lingkungan sekretariat.

d. faktor individu

Pengembangan dan peningkatan kesadaran serta pemahaman bagi pegawai pada Sekretariat Daerah

tentang upaya pemberantasan korupsi sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif akan perang terhadap korupsi, karena kesadaran kolektif hadir dan dimulai dari kesadaran dari individu dalam birokrasi.

e. faktor disiplin

Salah satu upaya yang ampuh untuk kemudian mereduksi praktik korupsi adalah disiplin yang tinggi bagi semua pegawai di lingkungan sekretariat daerah, oleh karena itu penegakan disiplin menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

f. faktor pemenuhan kebutuhan

Masalah kesejahteraan atau pemenuhan kebutuhan para pegawai menjadi sangat krusial dalam pemberantasan korupsi, sehingga sekretariat daerah atau pemerintah daerah harus memberikan intensif atau yang lebih dikenal dengan istilah TKD (tunjangan kerja daerah), diharapkan dengan stimulasi itu membuat para pegawai lebih fokus bekerja dan tercipta birokrasi yang bersih dari perilaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Mestawati, Elok Dyah dan Laksmi, Brigitta Isworo. 2011. "Gangren Desentralisasi" korupsi. Dalam Maria Hartiningsih, *Korupsi Yang Memiskinkan*, (Hal 73). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Zuhdi, Susanto. 2009. *Korupsi Ditinjau dari Segi Sejarah*. Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jilid XXXV No.I: LIPI Press

Internet

www.theglobal

[review.com/content_detail.php?lang=id&id...1](http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id...1). diakses pada tanggal 29 oktober 2011

<http://antikorupsi.org/antikorupsi/?q=tentang.icw>. diakses pada tanggal 1 maret 2012

<http://mjulijanto.wordpress.com/tag/tindakan-pidana-korupsi/>

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global>



Jurnal
Ideas
Publishing

P-ISSN 2442-367X